

**PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAMPUNG (STUDI
KASUS KAMPUNG DAMAI KOTA KECAMATAN DAMAI
KABUPATEN KUTAI BARAT)**

Ayu Kusuma Dewi

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 12, Nomor 1, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Proses Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kampung (Studi Kampung Damai Kota Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat)

Pengarang : Ayu Kusuma Dewi

NIM : 1702025115

Program : S1 Pemerintahan Integratif

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Pemerintahan Integratif Fisip Unmul

Samarinda, 12 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Budiman, S.IP, M.Si
NIP. 19770712 200501 1 003

Jumansyah, S.IP.,M.I.Pol
NIDN. 0003039302

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 PIN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Pemerintahan Integratif	Bagian Perpustakaan S1 PIN
Volume :	
Nomor :	
Tahun :	
Halaman :	

PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAMPUNG (STUDI KASUS KAMPUNG DAMAI KOTA KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT)

Ayu Kusuma Dewi¹, Budiman², Jumansyah³

Abstrak

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan infrastruktur kampung oleh pemerintah kampung di Desa Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, menjadi tujuan penelitian ini. Dimana masyarakat hanya sedikit yang berperan aktif dalam ikut serta pembangunan infrastruktur, masyarakat dapat melakukannya dengan berbagai cara seperti memberikan sumbangan berupa tenaga, uang, maupun ambisi yang dapat disampaikan langsung kepada pihak desa dan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan protokol.

Masyarakat kampung lebih banyak berperan aktif dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah kampung, adapun masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan infrastruktur tidak lain adalah yang mana memang dasarnya sebagai pekerja bangunan. Jadi selebihnya masyarakat kampung hanya memberikan aspirasi dan dukungan saja dikarenakan sudah ada tenaga kerja dari pekerja bangunan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sedangkan teknik penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk analisis guna memberikan informasi yang lebih mendalam dan terperinci. Berdasarkan temuan penelitian, mayoritas anggota masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan infrastruktur desa Kampung Damai melakukannya semata-mata karena aspirasi; anggota masyarakat lainnya adalah pekerja konstruksi. Diyakini bahwa dengan hasil seperti ini, masyarakat akan mampu berkontribusi melalui pekerjaan di masa mendatang, bukan sekadar mimpi.

Karena partisipasi masyarakat desa secara langsung akan mempercepat pelaksanaan pembangunan, maka sebagian masyarakat desa hanya dapat berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa, yang kemudian akan menentukan apakah aspirasi tersebut lebih penting atau tidak. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat desa tidak dapat berpartisipasi secara langsung karena banyaknya kegiatan pribadi. Pembangunan infrastruktur di desa sangat banyak, oleh karena itu perlu ditentukan mana yang lebih penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

Dalam pendekatan ini, pemerintah desa mendengar dan mewujudkan keinginan masyarakat desa, meskipun mereka tidak berpartisipasi secara aktif.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, infrastruktur kampung, kampung Damai.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ayudewikusuma99@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan Kabupaten pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat yang sekarang telah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Terbentuknya Kabupaten Kutai Barat sesungguhnya sudah lama sebab sejarah mencatat bahwa di Barong Tongkok pernah dibentuk kewedanan pada 5 November 1952. Kemudian pada tahun 1964 telah menjadi penghubung Bupati dari Tenggarong ke Barong Tongkok. Sampai pada 4 Oktober 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 47 yang secara konkret bersama-sama Kabupaten/Kota lainnya maka dibentuklah Kabupaten Kutai Barat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan melantik Pejabat Bupati pada 12 Oktober 1999 di Jakarta. Dengan pertimbangan sejarah tanggal 5 November dipilih sebagai hari jadi Kabupaten Kutai Barat dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002.

Masyarakat kampung yang tenang dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agar pembangunan terlihat lebih efisien dan baik dari segi finansial maupun hasil. Proses pelaksanaan sering kali terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat kampung Damai dalam pembangunan fisik, yang mengakibatkan pelaksanaan proyek kurang ideal. Selain kurangnya keterlibatan masyarakat, ada faktor lain yang menghambat proses pembangunan. Faktor tersebut antara lain faktor alam yang menjadi kendala utama, seperti hujan dan banjir yang terjadi di kampung Damai. Akibatnya, proses pembangunan sering kali terhambat oleh sejumlah faktor, dan waktu yang dibutuhkan sedikit lebih lama dari target yang diproyeksikan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan yang ada dikampung Damai lebih cepat terselesaikan disebabkan adanya partisipasi dari masyarakat yang ada. Bersumber pada informasi yang di bisa oleh penulis terdapat sebagian faktor yang jadi hambatan pada proses pelaksanaan pembangunan yakni bukan sebab minimnya pertisipasi melainkan faktor alam yang jadi penghambat utama seperti hujan serta banjir sehingga pelaksanaan proses pembangunan kerap kali terhambat sehingga memakan waktu lebih lama dari target yang diperkirakan.

Pembangunan infrastruktur kampung secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat kampung dengan usaha-usaha perusahaan. Tujuannya untuk menghubungkan kampung satu dan kampung lainnya, memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dalam konteks pembangunan infrastruktur kampung, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten 1988:378). Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Pemerintah, kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang telah diatur dalam pasal 126 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Camat yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Bupati.

Dari penjelasan tersebut jelaslah sudah bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kampung ataupun kelurahan bukan saja ditentukan oleh adanya peran pemerintah saja melainkan pula bergantung dari peran dan partisipasi masyarakat. Sasaran pembangunan merupakan tingkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diwajibkan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat pula perlu diberi peluang buat turut serta mengambil bagian dalam penataan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih

diprioritaskan dilakasankan dikampung supaya terbentuk bahwa benar-benar pembangunan dari masyarakat.

Karena pada dasarnya, kegiatan partisipasi masyarakat berkembang dari bawah ke atas melalui inisiatif dan kreatifitas yang berasal dari kesadaran akan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip pembangunan kampung atau kelurahan, yang pada dasarnya dilakukan melalui bimbingan, pembinaan, dorongan, dan pengawasan pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan sukses, perlu ada faktor pendorong yang menentukan dan pendobrak untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Partisipasi Desa/Kampung

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai istilah sastra kuno yang merujuk pada lokasi, tanah, atau wilayah. Desa juga dapat merujuk pada kumpulan tempat tinggal yang merupakan bagian dari suatu unit di luar kota. Dari sudut pandang geografis, desa merupakan hasil dari sekumpulan kegiatan masyarakat yang dipadukan dengan lingkungannya. Kombinasi ini menghasilkan bentuk atau tampilan di Bumi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan fisiologis yang berinteraksi satu sama lain dan dengan wilayah lain.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo istilah desa dapat diartikan ke dalam tiga istilah yaitu desa, dusun dan desa yang semuanya berasal dari suku kata swa desa. Istilah ini sama maknanya dengan negara, negeri, nagari yang berasal dari kata nagaram.

Dalam buku “Encyclopaedia Britannica” (2015) disebutkan bahwa desa didefinisikan sebagai komunitas yang tidak terlalu padat penduduk dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah.

Dalam bukunya yang berjudul “Desa” (1953) Sutardjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan Permasalahannya” (1983), Bintarto, Mantan Guru Besar Fakultas Geografi UGM, menyebut bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Desa memiliki banyak sebutan di masyarakat Indonesia di daerah Sunda desa disebut dengan kampung sementara di Madura desa disebut dengan kanpong lalu di Aceh desa dikenal dengan nama Gampong dan di Padang dengan sebutan nagari.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dari semua pendapat yang ada mengenai peran serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu untuk memberikan pendapat dan tenaga baik secara kelompok maupun sendiri dalam suatu kegiatan baik formal maupun informal, serta harus didukung oleh kesadaran dari dalam dirinya sendiri atau dorongan dari orang lain untuk ikut terlibat dalam memberikan aspirasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan secara keseluruhan, Haliim (2020). Tidak

diragukan lagi bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka, komunikatif, demokratis, bertanggung jawab, dan transparan, Rahman (2016).

Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis, 19962) dalam Santoso (1998:12).

Menurut Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati 2019), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusinya, membuat dan mengembalikan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani masalah, melakukan upaya untuk menangani masalah, dan menilai perubahan yang terjadi.

Sastropoetro (1998) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan, partisipasi, atau keterlibatan yang terkait dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan egois atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari sekedar kegiatan fisik semata, Minahasa (2007).

Teori Pembangunan Infrastruktur Kampung

Teori Pembangunan Infrastruktur Desa menekankan betapa pentingnya membangun infrastruktur yang memadai di tingkat desa untuk meningkatkan standar hidup komunal dan mendorong pembangunan ekonomi regional.

Dalam pengertian ini, infrastruktur tidak hanya mencakup aset berwujud seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi, tetapi juga ketersediaan layanan publik seperti teknologi informasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Diharapkan dengan mengintegrasikan pendekatan ekologi dan sosial dalam pembangunan infrastruktur, desa akan menjadi lebih tangguh, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional. Penerapan teori ini diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan ekonomi di desa, sehingga menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat setempat agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi mereka dengan baik. Selain itu, teori ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan keterlibatan warga.

Adisasmita (Rahman, 2016) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dan merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan dari masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah usaha yang didasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Todaro (Maripah, 2017) menyatakan bahwa pembangunan harus melampaui aspek materi dan finansial dari kehidupan manusia, bukan hanya fenomena.

Menurut Todaro (Maripah, 2017) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (Hayati, 2017) menyatakan bahwa pembangunan prasarana satu diantaranya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan pada perekonomian. Pembangunan baik secara fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui

beberapa gabungan proses sosial, ekonomi dan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Nain (2019).

Berdasarkan potensi daerah, para ahli tersebut berpendapat bahwa pembangunan pedesaan merupakan komponen penting pembangunan nasional yang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah pedesaan secara berkelanjutan. Selain berfokus pada faktor material dan finansial, pembangunan ini juga bertujuan untuk menghilangkan hambatan finansial dengan meningkatkan infrastruktur. Untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, pembangunan mencakup proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi landasan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan sejahtera merupakan proses pembangunan fisik yang merupakan perwujudan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan sejahtera yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, jika penyebabnya masih apatisme masyarakat terhadap pembangunan, maka pembangunan infrastruktur dilakukan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk mendukung suatu program dengan berbagai cara adalah melalui partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran fisik saja, tetapi juga mencakup berbagai ide dan penyelesaian masalah.

Membangun infrastruktur adalah fondasi penting untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil. Proses pembangunan fisik ini adalah cara bangsa ini menggapai cita-citanya, yaitu kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur sebaiknya melibatkan masyarakat, terutama jika sikap apatis masih menjadi penghalang. Partisipasi masyarakat adalah salah satu cara untuk mendukung program pembangunan. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya berarti kehadiran fisik, tetapi juga sumbangannya ide dan solusi.

Demokratisasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kebijakan pembangunan, terutama yang berdampak langsung pada mereka, seperti program pengentasan kemiskinan. Seperti yang dikatakan Todaro (2000), pembangunan bukan hanya soal materi dan uang, tetapi juga melibatkan pengorganisasian dan perbaikan sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur dengan pendekatan partisipatif mencakup berbagai bentuk kontribusi, mulai dari ide, tenaga, keahlian, barang, hingga uang.

Dengan metode ini, masyarakat menjadi pusat perhatian dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian pembangunan. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat adalah kelompok yang paling mengetahui mentalitas, sistem nilai perilaku, adat istiadat, kebiasaan, dan lingkungannya sendiri.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi Langsung

Ketika orang-orang menunjukkan perilaku tertentu selama proses partisipasi, partisipasi terjadi. Ketika setiap orang mampu menyuarakan pendapat, memperdebatkan topik, dan menentang keinginan atau komentar orang lain, keterlibatan ini terjadi.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Ketika orang menetapkan hak partisipasinya, partisipasi terjadi. Salah satu dari empat kategori partisipasi yang diidentifikasi oleh Cohen dan yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011:61–63) adalah keterlibatan awal dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dalam implementasi berada di urutan kedua. Ketiga, keterlibatan dalam

penggunaan. Keempat, keterlibatan dalam penilaian. Partisipasi dalam pengambilan keputusan berada di urutan pertama. Keterlibatan ini terutama berkaitan dengan mengidentifikasi opsi dengan masyarakat seputar konsep atau konsep yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Menyumbangkan ide atau pemikiran, menghadiri rapat, berpartisipasi dalam diskusi, dan menerima atau menolak program yang disajikan adalah semua contoh cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, keterlibatan dalam implementasi memerlukan elaborasi program, tugas administratif, koordinasi, dan mobilisasi sumber daya keuangan. Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan, partisipasi dalam implementasi merupakan perluasan dari rencana sebelumnya. Ketiga, tidak mungkin untuk memisahkan keterlibatan pengambilan manfaat dari hasil implementasi yang dicapai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini terbukti dari keluaran dalam hal kualitas dan dari % keberhasilan program dalam hal kuantitas. Keempat, keterlibatan dalam penilaian. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dikaitkan dengan partisipasi dalam evaluasi ini. Tujuan dari partisipasi dalam tinjauan ini adalah untuk memastikan apakah program yang telah dijadwalkan sebelumnya berhasil.

Partisipasi dalam masyarakat telah lama dibicarakan dan tercermin dalam berbagai situasi dan kesempatan. Tujuannya adalah agar sebanyak mungkin anggota masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan bantuan guna meningkatkan, mengefisiensikan, mempercepat, dan menjamin keberhasilan inisiatif pembangunan. Oleh karena itu, secara umum, partisipasi dapat dipahami sebagai komponen "partisipasi" atau terlibat dalam kegiatan koperasi.

Konsep Pembangunan Infrastruktur

Sistem fisik yang mendukung transportasi, pengairan, drainase, bangunan, dan fasilitas publik disebut sebagai infrastruktur. Keberadaannya krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi. Kogoya dan rekan-rekannya (2015) berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan tanggung jawab individu, seperti halnya pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang terdiri dari bangunan, fasilitas umum, irigasi, drainase, dan transportasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Sama seperti kebutuhan dasar lainnya, infrastruktur dilaksanakan oleh perorangan.

Definisi Konsepsional

Peristiwa yang menjadi fokus penelitian diringkas dalam definisi atau kerangka konseptual, yang juga membatasi cakupan penelitian. Judul yang dipilih penulis untuk kasus ini, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Damai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat," berguna untuk menentukan apakah penduduk Desa Damai, Kota, terlibat dalam pembangunan infrastruktur lokal mereka, khususnya terkait potensi infrastruktur jalan di Desa Damai, Kota, di mana pembangunan jalan infrastruktur dapat menguntungkan semua masyarakat antardesa.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif, khususnya menggunakan metode untuk menggali dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok

masyarakat yang diduga berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, sebagaimana dapat dilihat dari pengamatan penulis yang akan diteliti. Mengajukan pertanyaan dan mengikuti prosedur, mengumpulkan data tertentu dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik tertentu ke tema yang lebih luas, dan menafsirkan data merupakan langkah-langkah penting dalam pendekatan kualitatif ini. Struktur atau kerangka laporan akhir kajian ini bersifat adaptif. Siapa pun yang mengerjakan proyek ini perlu menggunakan pendekatan penelitian induktif, yang berfokus pada orang dan menerjemahkan kompleksitas suatu masalah. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Damai, Kecamatan Damai, model pendekatan kualitatif dalam kajian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif.

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur

Melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur merupakan upaya berkelanjutan yang memenuhi tuntutan masyarakat setempat. Masyarakat sangat menyadari lingkungan sekitar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh infrastruktur yang dibangun.

Masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi desain yang memenuhi persyaratan lokal dan menjamin bahwa proyek mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas dengan berpartisipasi secara aktif. Partisipasi dari masyarakat juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan proyek, yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan memperpanjang masa manfaatnya. Selain itu, karena memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan dan pelacakan kemajuan proyek, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pembangunan. Musyawarah, konsultasi publik, kelompok kerja pemerintah-masyarakat, dan pemantauan dan penilaian proyek adalah beberapa cara agar masyarakat dapat terlibat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan gagasan yang mendukung praktik pembangunan yang layak, adil, dan berkelanjutan selain menjadi prasyarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Membangun proyek yang secara teknis baik dan peka terhadap kebutuhan dan tujuan setempat memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat dapat memberikan wawasan penting tentang dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah mereka ketika mereka terlibat aktif dalam semua fase proyek, dari desain hingga pelaksanaan dan pemeliharaan. Hal ini memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memilih solusi terbaik dan paling tahan lama bagi semua orang.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan situasi setempat merupakan salah satu keuntungan utama dari keterlibatan masyarakat. Masyarakat sangat menyadari kesulitan yang mereka hadapi setiap hari, seperti infrastruktur yang rusak, akses terbatas, atau kurangnya layanan penting. Para pembuat kebijakan dan perencana infrastruktur dapat memastikan bahwa solusi yang disarankan relevan dan berhasil dengan memasukkan sudut pandang masyarakat ke dalam desain proyek melalui komunikasi langsung.

Partisipasi masyarakat juga memungkinkan proyek infrastruktur diterima secara lebih luas. Masyarakat cenderung mendukung proyek dan berperan aktif dalam pemeliharaan dan pelestariannya di masa mendatang jika mereka yakin pendapat mereka didengar dan diperhitungkan selama proses pengambilan keputusan. Karena masyarakat memiliki rasa kepemilikan atas infrastruktur yang telah mereka bantu rancang dan bangun, hal ini membantu menjamin kelangsungan proyek dalam jangka panjang.

Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengambilan Keputusan

Proses pembangunan infrastruktur desa diawali dengan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat telah berkembang menjadi dasar yang kuat untuk mengorganisasi dan melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Untuk kemajuan pembangunan infrastruktur di Kampung Damai Kota, proses ini dapat dilakukan melalui diskusi kolaboratif dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Semua tujuan, pendapat, kritik, dan rekomendasi masyarakat dapat diungkapkan dan didiskusikan secara bebas selama diskusi ini. Masyarakat dapat menetapkan tujuan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan kemungkinan setempat berkat wacana demokrasi ini.

Pemilihan proyek infrastruktur yang dianggap paling penting dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dilakukan setelah kebutuhan diidentifikasi melalui musyawarah; proses ini tidak hanya melibatkan perwakilan pemerintah dan tokoh masyarakat, tetapi juga menjamin bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Adanya musyawarah kolaboratif ini dapat menjadi dasar untuk menciptakan desain rencana kerja yang lebih komprehensif.

Setelah tahap perencanaan selesai, tahap pelaksanaan proyek menentukan apakah keterlibatan masyarakat diperlukan atau tidak. Melalui sumbangan materiil dan dukungan moral, masyarakat akan terlibat aktif dalam pelaksanaan proyek. Masyarakat juga mengambil bagian dalam pengawasan dan pemantauan untuk memastikan proyek dilaksanakan sesuai dengan standar, anggaran, dan rencana yang ditetapkan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat tidak berakhir dengan pelaksanaan. Masyarakat terus terlibat dalam pemeliharaan dan administrasi infrastruktur yang dibangun setelah proyek selesai. Ini mencakup tugas-tugas standar termasuk pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan infrastruktur sebagai respons terhadap perubahan permintaan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan

Setelah kedua belah pihak mencapai keputusan akhir dari diskusi bersama, pada tahap ini partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai pengamat, tetapi mereka berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.

Salah satu bentuk partisipasi nyata adalah melalui sumbangan tenaga kerja langsung, namun tidak semua masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan karena masyarakat memiliki banyak kegiatan sendiri, sehingga masyarakat yang melaksanakan proyek pembangunan tidak lain adalah masyarakat yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam proyek pembangunan seperti pengaspalan jalan, namun mereka cukup terlibat dalam kegiatan yang disponsori masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa gotong royong di pinggir jalan.

Selain memberikan bantuan fisik, partisipasi masyarakat juga mencakup pemantauan dan pengawasan proyek. Masyarakat secara aktif memantau kemajuan proyek, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan menemukan serta menyelesaikan masalah atau tantangan apa pun yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

Selain meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan uang publik, hal ini menjamin bahwa proyek akan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selama fase implementasi ini, pekerja proyek juga perlu mendapatkan dukungan moral dan sosial. Sebagai tanda terima kasih atas upaya mereka dalam menciptakan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat memberikan dukungan moral kepada pekerja proyek. Selain meningkatkan motivasi dan kegembiraan karyawan, dukungan

terhadap proyek ini menumbuhkan hubungan sosial yang erat antara masyarakat dan pelaksana proyek, yang dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat pada tahap ini tidak hanya penting bagi penyelesaian proyek infrastruktur, tetapi juga merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa secara keseluruhan. Memberikan suara dalam pengambilan keputusan hanyalah salah satu aspek dari keterlibatan ini; aspek lainnya adalah berkontribusi secara aktif terhadap terwujudnya tujuan bersama untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan di tingkat lokal.

Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pemanfaatan Hasil

Tahap pelaksanaan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa, baik fisik maupun nonfisik, bukan hanya sekadar menjalankan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara untuk berpartisipasi secara langsung adalah dengan memberikan kontribusi langsung kepada tenaga kerja. Selain menerima manfaat, warga juga turut serta dalam pembangunan infrastruktur desa. Mereka berpartisipasi aktif dalam sejumlah proyek, mulai dari pembangunan jalan dan saluran air hingga pembangunan infrastruktur publik lainnya.

Lebih jauh lagi, ada banyak keuntungan, dan masyarakat yang menyediakan tenaga kerja dapat memainkan peran penting dalam mengawasi dan melacak kemajuan proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Sebagai mata dan telinga yang waspada, masyarakat setempat memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu melihat potensi masalah selama pelaksanaan proyek sehingga dapat segera diperbaiki. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta kualitas pelaksanaan proyek, dapat dipertahankan melalui keterlibatan masyarakat dalam pemantauan proyek.

Oleh karena itu, keberhasilan proyek infrastruktur desa yang lebih baik bukanlah satu-satunya alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Selain menjadi donatur, masyarakat Desa Damai Kota secara aktif berkontribusi dalam pengembangan masa depan yang lebih baik bagi desa dan generasi mendatang melalui keterlibatan masyarakat secara langsung, pengawasan proyek, dan dukungan spiritual.

Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi Hasil

Di Desa Damai Kota, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, hasil evaluasi merupakan langkah krusial dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Di tahap ini, masyarakat ikut menilai pengaruh dan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang telah selesai. Dengan berpartisipasi aktif dalam evaluasi, masyarakat turut memberikan masukan yang mendalam kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tentang kinerja proyek, kendala yang dihadapi, dan area untuk pengembangan di masa mendatang.

Pertemuan publik, diskusi kelompok, dan survei populasi hanyalah beberapa cara masyarakat dapat terlibat dalam tahap tinjauan hasil. Penduduk desa diminta untuk mengevaluasi dampak dan kualitas proyek infrastruktur, serta apakah proyek tersebut memenuhi persyaratan dan harapan mereka dan memberikan saran untuk peningkatan di masa mendatang, sebagai bagian dari survei populasi. Masyarakat dapat secara langsung mengungkapkan pendapat dan pengalaman mereka dalam pertemuan publik. Namun, diskusi kelompok memberikan masukan yang lebih mendalam tentang komponen proyek tertentu.

Bila masyarakat dilibatkan dalam tahap evaluasi hasil, mereka tidak hanya memberikan masukan tetapi juga membantu mengusulkan perubahan atau jawaban potensial terhadap isu-isu baru. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi hasil.

Jika mempertimbangkan semua hal, keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi hasil merupakan langkah awal yang penting menuju pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Masyarakat dapat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masa depan desa mereka sendiri dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sejalan dengan kebutuhan dan tujuan mereka dengan berpartisipasi aktif dalam peninjauan proyek pembangunan infrastruktur.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada banyak aspek yang berbeda dan rumit yang memengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam urusan publik merupakan salah satu penentu utama. Masyarakat yang memahami nilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan lain yang menghimpun pendapat dan tujuan dari masyarakat.

Lebih jauh lagi, tingkat partisipasi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi. Masyarakat yang berpendidikan tinggi dan lebih stabil secara ekonomi cenderung memiliki akses ke sumber daya dan informasi, sehingga mereka lebih mampu dan cenderung berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun, mereka yang berpenghasilan rendah tetap dapat terlibat dengan berupaya meningkatkan infrastruktur desa, bahkan ketika kondisi seperti kemiskinan, ekonomi yang tidak stabil, atau akses yang tidak merata ke sumber daya dapat menjadi hambatan bagi keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang menghargai kerja sama timbal balik dan memiliki warisan partisipatif yang kuat cenderung lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa. Tingkat partisipasi masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti perbedaan budaya, konflik internal dalam kelompok, atau penentangan terhadap perubahan.

Unsur-unsur tersebut dapat berinteraksi dan saling memengaruhi untuk membentuk pola partisipasi masyarakat di Desa Damai Kota. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memahami dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat secara terpadu dan aktif. Hal ini akan membuat upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lebih berhasil dan berdampak positif pada pembangunan desa secara keseluruhan.

Banjir merupakan salah satu faktor yang sering menjadi penghambat tahap pembangunan infrastruktur, yang otomatis menghambat proses pembangunan. Selain hujan, faktor lain yang menghambat tahap pembangunan infrastruktur adalah minimnya bahan bangunan, sehingga menimbulkan kendala dalam penyelesaian proyek yang sedang berjalan.

Bentuk Partisipasi Langsung dan Partisipasi Tidak Langsung

a. Partisipasi Langsung

Menurut penulis partisipasi langsung dalam tahap pembangunan infrastruktur yang di laksanakan, hanya berupa masyarakat yang bekerja sebagai pekerja bangunan dan di gerakkan langsung oleh pemerintah. Selain itu, mereka yang tidak terlibat dalam tahap pembangunan infrastruktur sering mengadakan aksi gotong royong untuk

membersihkan rumput liar di pinggir jalan. Hal ini dilakukan agar arus lalu lintas dapat lancar tanpa terhalang oleh rumput. Karena di sepanjang jalur akses Kecamatan Damai terdapat beberapa tempat yang terdapat jurang di pinggir jalan, jika rumput liar tersebut tidak dibersihkan akan menyulitkan pengendara yang datang dari arah berlawanan untuk melihat.

Contoh bentuk partisipasi langsung lainnya adalah ada beberapa masyarakat yang memberikan tanahnya tanpa memungut biaya, untuk menimbun jalan yang dimana jalan tersebut berlubang sehingga dibutuhkan penimbunan tanah. Masyarakat yang memberikan tanahnya tanpa di pungut biaya ini, biasanya memiliki tanah yang tidak rata dengan tanah yang ada di sekitarnya.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Menurut penulis tentang partisipasi tidak langsung ini, masyarakat yang akan memberikan aspirasi nya melalui musyawarah yang diadakan oleh pemerintah kampung. Selain aspirasi, masyarakat dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan infrastruktur yang sedang terlaksana maupun yang akan dilaksanakan di kemudian hari.

Selain itu, selama proyek pembangunan berlangsung, mereka yang tidak ikut serta dapat menjadi pengamat. Karena jadwal atau pekerjaan masing-masing, hanya sedikit warga setempat yang dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, tidak

dapat dipungkiri bahwa pemerintah segera mengerahkan pekerja konstruksi jika hanya mereka yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur kampung dapat di simpulkan bahwa :

- a. Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2020 di Kampung Damai Kota Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat berfokus pada pembangunan infrastruktur kampung fisik untuk menunjang kegiatan masyarakat. Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan untuk pembangunan semenisasi jalan, semenisasi depan pentas lapangan Volly, pembuatan prasasti atau tugu untuk kodefifikasi aset, pembangunan wc 2 pintu, pembangunan teras pasar, semenisasi halaman TK Tunas Rose atau PAUD, semenisasi jalan Rahayu.
- b. Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2021 di Kampung Damai Kota Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan untuk menunjang kegiatan masyarakat. Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah semenisasi jalan gang gamas, semenisasi jalan gang pemancingan depan, semenisasi jalan gang pemancingan dan pembangunan gedung serbaguna.
- c. Penggunaan Dana Desa anggaran tahun 2022 di Kampung Damai Kota Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat berfokus pada pembangunan semenisasi dibawah jembatan Temenggung Singayudha yang biasa dijadikan masyarakat sebagai lapangan bermain tenis meja atau kegiatan seperti acara fashion show sarut.
- d. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak terlalu berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, dilihat dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan dan tahap evaluasi hasil pembangunan masyarakat berperan dalam memberikan aspirasinya, tetapi untuk turut serta dalam tahap pelaksana pembangunan seperti semenisasi jalan yang turut serta hanya masyarakat yang

bekerja sebagai tukang bangunan selama proses pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan. Lalu masyarakat yang hanya memberikan aspirasi terkadang juga turut serta dalam kegiatan gotong royong sisi jalan, dikarenakan disisi jalan dipenuhi dengan rumput liar sehingga terkadang diadakan kegiatan gotong royong.

Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran yang semestinya dapat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Damai Kota Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat :

- a. Untuk lebih memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, maka pemerintah khususnya pemerintah Kampung disamping memberikan pemahaman dan motivasi juga harus lebih mengedepankan aspirasi masyarakat dalam kepentingan pembangunan.
- b. Pemerintah Kampung diharapkan agar terus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat serta mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap program pembangunan, baik proses maupun dalam pelaksanaan agar setiap pembangunan dapat berjalan dan tepat pada sasaran.
- c. Sebagai masyarakat kampung juga diperlukan menyadari bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjadi pengawas dan menjaga pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan.
- d. Masyarakat harus secara aktif memiliki kesadaran dalam perannya yang penting untuk menjadikan infrastruktur kampung yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Colin Macfarquhar (2015). Buku Encyclopaedia Britannica. Inggris.
Sutardjo Kartohadikusumo. (1953). Desa. Edisi Cetak 1. Jakarta Balai Pustaka 1984.
Bintaro. (1983). Desa-Kota dan Permasalahannya. Edisi Cetak ke 2. Jakarta.
Rahman. (2016). Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan. Bandung.
Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan.
Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 7.
Hayati, N. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Administrasi Negara, 5, 5375-5388.
Kogoya, T. Olfie B. Laoh, E. (2015). Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(2), 1-14.
Korten, D.C. Sjahrir. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nain. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Pembangunan Desa.

Dokumen

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Undang-Undang (UU). Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penataan Kampung. Bupati Kutai Barat. No. Kalimantan Timur.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Undang-Undang (UU). Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat. Provinsi Kalimantan Timur.
-

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang (UU). Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia. Undang-Undang (UU). Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. JDIIH BPK RI.

Skripsi

Riskayanti. (2021). *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).

Febry Nur Fauza. (2018). *“Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Muhammad Fikri. (2023). *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur : Studi Kepemimpinan Kepala Desa Slamet Riyanto dan Kepala Desa PLT Imam Purkendi di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2022”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Ferdi Ananda. (2020). *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”*. (Skripsi, Universitas Islam Riau Negeri Sultan Syarif Kasiau Pekanbaru).